

9 Pemantauan dan Evaluasi

Bab ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana dan mengapa rencana pemukiman kembali perlu dipantau dan dievaluasi. Bab ini menjelaskan definisi istilah-istilah pokok dan menyarankan metode-metode dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pemukiman kembali.

Pemantauan, Pengkajian dan Evaluasi: Istilah-istilah Dasar

Pemantauan pemukiman kembali berarti pengumpulan, analisis, pelaporan dan penggunaan informasi tentang kemajuan pemukiman kembali berdasarkan RPK. Pemantauan bertumpu pada sasaran fisik dan keuangan dan penyerahan entitelmen (bantuan yang layak diterima OTD berdasarkan jenis kerugian yang dialami OTD). Pemantauan biasanya dilakukan sendiri oleh instansi pelaksana, kadang-kadang dengan bantuan ahli pemantauan berasal dari luar. Laporan biasanya diserahkan pada bank.

Pengkajian pemukiman kembali berjalan secara teratur dan pada titik-titik penting siklus proyek, misalnya pada pertengahan periode. Selama pengkajian, pembuat keputusan proyek bersidang bersama dengan stekholder (pihak yang berkepentingan dan terkait) untuk menilai kemajuan pemukiman. Pengkajian didasarkan pada hasil pemantauan dan laporan evaluasi serta data lain. Dengan dasar itu, para pengkaji mencapai persetujuan dan memutuskan tindakan apa yang diperlukan dalam rangka memperbaiki pelaksanaan pemukiman kembali dan merespon kondisi yang berubah. Pihak bank dapat berpartisipasi dalam pengkajian ini khususnya dalam pemukiman berskala besar.

Evaluasi pemukiman kembali berlangsung selama dan setelah pelaksanaan. Hal ini dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan pemukiman kembali, khususnya apakah mata pencarian atau taraf hidup telah pulih atau meningkat. Evaluasi mengenai daya dan hasil guna, dampak dan kesinambungan pemukiman kembali, dapat digunakan sebagai pelajaran dan bahan untuk perencanaan berikut. Evaluasi dibedakan dengan pemantauan, karena evaluasi lingkungannya lebih luas, waktunya tidak terlalu sering, dan adanya keterlibatan ahli yang independen. Biasanya dilaksanakan oleh pihak luar, dan merupakan kesempatan bagi perencanaan dan pengambil kebijakan memikirkan lebih luas keberhasilan daripada hanya tujuan, strategi dan pendekatan dasar pemukiman kembali.

Rencana Pemantauan dan Evaluasi Pemukiman Kembali

IP proyek bertanggung-jawab mengorganisir dan memberdayakan upaya-upaya pemantauan dan evaluasi. RPK akan menetapkan rincian pengaturan P&E, termasuk:

- Distribusi tanggung-jawab pemantauan dan evaluasi dalam unit atau instansi pemukiman kembali. Untuk pemukiman kembali berskala besar, lebih baik jika ada tim khusus P&E. Untuk pemukiman kembali yang melibatkan instansi-instansi lain atau beberapa jenjang pemerintahan diperlukan suatu rencana koordinasi;
- Tanggung-jawab atas tugas tertentu, termasuk pengumpulan data, analisis data, verifikasi, pengendalian mutu, koordinasi dengan instansi terkait, penyusunan laporan, penyerahan laporan kepada pembuat keputusan dan Bank, tanggung jawab mengkaji dan menindak-lanjuti laporan;
- Metode yang digunakan mengumpulkan dan menganalisis data;
- Sumber-daya yang disyaratkan untuk survai lapangan dan untuk penyimpanan catatan termasuk persyaratan ahli di bidang sosiologi, antropologi sosial dan pemukiman kembali sebagaimana ditentukan dalam kebijaksanaan Bank;
- Persyaratan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pemantauan dan evaluasi termasuk rencana dan anggaran pelatihan;
- Kerangka waktu untuk pengumpulan data, penyusunan dan penyerahan laporan; dan
- Anggaran pemantauan dan evaluasi.

Pemantauan Internal

IP biasanya bertanggung-jawab penuh atas pemantauan internal. Pemantauan dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pemberian entitelmen, kerangka waktu dan anggaran yang ditentukan dalam RPK. Pemantauan internal sering berdasarkan atas sistem kartu yang tersimpan di kantor pemantauan yang mencatat mengenai entitelmen dan ganti rugi yang diterima oleh rumah tangga yang terkena dampak. Beberapa negara menyediakan untuk tiap-tiap orang atau rumah tangga, kartu pemukiman kembali yang mencatat entitelmen dan yang diterima, untuk kepentingan mereka.

Sistem pencatatan didukung oleh survai berkala yang dirancang untuk mengukur perubahan yang terjadi pada data dasar yang dicatat pada awal sensus dan survai. Survai berkala bertumpu pada penerimaan entitelmen untuk OTD dan indikator manfaat yang diterima.

Penyusun RPK akan mengembangkan metode pemantauan, termasuk dengan metode survai berkala serta metode pencapaian kemajuan terhadap kegiatan dan entitelmen yang termasuk dalam rencana. Metode tersebut untuk menentukan rencana survai, kerangka pengambilan contoh, frekuensi, sumber daya dan tanggung jawab. Pemantauan biasanya dilakukan selama proyek berlangsung, bahkan setelah periode kegiatan pemukiman kembali yang intensif. Kebijaksanaan Bank menetapkan bahwa fase pemulihan pemukiman kembali yang lengkap dapat diperpanjang, dan memerlukan pemantauan setelah kegiatan pemukiman kembali selesai, kadang-kadang sampai setelah fasilitas proyek berfungsi dan pendanaan Bank sudah selesai.

Indikator-indikator pemantauan akan dipilih sedemikian rupa sehingga mencerminkan kualitas kegiatan dan matriks entitelmen. Contoh indikator pemantauan, dimana indikator tertentu dapat dikembangkan dan disempurnakan menurut keadaan, dikemukakan dalam Tabel 9.1.

Pemantauan Eksternal dan Evaluasi

IP biasanya menunjuk lembaga independen melakukan P&E untuk memberikan informasi secara lengkap dan objektif. Evaluasi setelah pelaksanaan pemukiman kembali merupakan bagian tidak terpisahkan dari siklus proyek. Evaluasi independen dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dari luar atau konsultan, universitas atau LSM pembangunan. Tugas lembaga eksternal tersebut adalah untuk:

- Memeriksa hasil pemantauan internal;
- Menilai apakah tujuan pemukiman kembali tercapai, khususnya, apakah mata pencarian dan taraf hidup telah dipulihkan atau ditingkatkan;
- Menilai efisiensi, efektivitas, dampak dan kesinambungan pemukiman kembali, yang hasilnya akan menjadi acuan untuk pembuatan dan perencanaan kebijaksanaan pemukiman kembali di masa yang akan datang;
- Memastikan apakah entitelmen pemukiman kembali sudah memenuhi tujuan dan apakah tujuan tersebut sesuai dengan keadaan OTD.

Tabel 9.1
Indikator Potensial untuk Pemantauan

| Jenis Pemantauan | Dasar untuk Indikator |
|-----------------------------|--|
| Anggaran dan Kerangka Waktu | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apakah semua staf pengadaan lahan dan pemukiman kembali telah ditunjuk dan dimobilisasikan ke lapangan dan di kantor sesuai menurut jadwal? ▪ Apakah peningkatan kemampuan dan kegiatan pelatihan telah diselesaikan menurut jadwal? ▪ Apakah kegiatan pelaksanaan pemukiman kembali tercapai sesuai dengan rencana pelaksanaan yang disetujui? ▪ Apakah dana pemukiman kembali dialokasikan pada instansi pemukiman kembali tepat pada waktunya? |

| | |
|---|--|
| <p>Penyerahan/Pelaksanaan Entitelmen OTD</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apakah kantor pemukiman kembali telah menerima dana sesuai dengan jadwal? ▪ Apakah seluruh dana telah dikeluarkan menurut RPK? ▪ Apakah tahap persiapan sosial berlangsung menurut jadwal? ▪ Apakah seluruh lahan telah dibebaskan dan ditempati tepat pada waktunya untuk pelaksanaan proyek? ▪ Apakah seluruh OTD telah menerima entitelmen sesuai dengan jumlah dan kategori kerugian yang tercantum dalam matriks entitelmen? ▪ Apakah OTD telah menerima pembayaran tepat pada waktunya? ▪ Apakah OTD yang menyewakan lahan untuk sementara telah dibayar ganti ruginya? ▪ Apakah semua OTD telah menerima biaya transport, biaya relokasi, tunjangan hidup dan uang bantuan apa pun yang telah disetujui, menurut jadwal? ▪ Apakah semua bidang lahan-pengganti atau kontrak telah disediakan? Apakah pematangan lahan sebagaimana ditentukan? Apakah langkah-langkah dalam memberi hak legal atas lahan untuk OTD sedang dilakukan? ▪ Berapa rumah tangga OTD telah menerima hak legal atas lahan? ▪ Berapa jumlah OTD telah menerima rumah sebagaimana pilihan relokasi dalam RPK? ▪ Apakah mutu rumah memenuhi standar yang disetujui? ▪ Apakah tempat relokasi telah dipilih dan dibangun sesuai standar yang disetujui? ▪ Apakah OTD mendiami rumah baru? ▪ Apakah langkah-langkah bantuan sedang dilaksanakan sebagaimana direncanakan untuk penduduk setempat? ▪ Apakah pemulihan didahului dengan penyediaan prasarana dan fasilitas sosial? ▪ Apakah OTD mendapatkan kemudahan dalam hal sekolah, pelayanan kesehatan, tempat dan kegiatan sosial budaya? ▪ Apakah kegiatan pemulihan pendapatan dan mata pencaharian dilaksanakan sebagaimana dikemukakan dalam rencana pemulihan pendapatan, misalnya, menggunakan lahan-pengganti, proses produksi berjalan, sejumlah OTD dilatih dan diberi pekerjaan, pemberian kredit, sejumlah kegiatan untuk memperoleh pendapatan dibantu? ▪ Apakah bisnis/usaha yang terkena dampak telah menerima hak ganti rugi termasuk pemindahan dan pembayaran semua kerugian akibat kehilangan usahanya dan produksi berhenti? |
| <p>Konsultasi, Pengaduan dan Masalah-masalah Khusus</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apakah konsultasi berjalan sebagaimana dijadwalkan termasuk rapat, pertemuan kelompok, dan kegiatan masyarakat terkait lainnya? Apakah surat edaran pemukiman telah dipersiapkan dan dibagikan? ▪ Berapa banyak OTD yang mengetahui hak yang harus diterima? Berapa banyak yang telah menerima ganti rugi sesuai haknya? ▪ Apakah ada OTD yang memanfaatkan prosedur pengaduan? Apa hasilnya? ▪ Apakah perselisihan telah diselesaikan? ▪ Apakah fase persiapan sosial telah dilaksanakan? ▪ Apakah langkah-langkah khusus untuk penduduk suku terasing telah dilaksanakan? |
| <p>Pemantauan Manfaat</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perubahan apa yang telah berlangsung dalam hal pola pekerjaan, produksi dan penggunaan sumber daya dibandingkan dengan keadaan sebelum proyek? ▪ Perubahan apa yang telah terjadi dalam hal pola pendapatan dan pengeluaran dibandingkan dengan keadaan sebelum proyek? Ada |

| | |
|--|--|
| | <p>perubahan apa dalam biaya hidup dibandingkan keadaan sebelum proyek? Apakah pendapatan OTD sejalan dengan perubahan ini?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perubahan apa yang terjadi dalam parameter sosial dan budaya yang terkait dengan taraf hidup? ▪ Perubahan apa yang terjadi untuk kelompok rentan? |
|--|--|

RPK akan menetapkan persyaratan P&E eksternal, biasanya dalam bentuk KA untuk instansi eksternal. Tim eksternal biasanya akan diminta untuk survai setiap tahun guna memperbaharui data dasar yang asli, yang menitikberatkan pada pemantauan dan evaluasi manfaat dari tujuan pemukiman kembali. Tim eksternal akan membuat data dasar pemantauan dan evaluasi, yang dikembangkan dari sistem pencatatan proyek sendiri. Hal ini dapat mencakup peta, tabel, foto harta yang terkena dampak; salinan kontrak dan hak legal lahan, pembayaran serta dokumen penaksiran harga yang berkaitan dengan pemukiman kembali.

Desain kuesioner dan contoh kerangka akan dirancang untuk mengembangkan data dasar "sebelum" dan "setelah" pemukiman kembali. Pada umumnya survai akan menggunakan kuesioner rumah tangga untuk memperoleh data mengenai indikator pokok terhadap kemajuan kegiatan, efisiensi, efektivitas, dampak dan kesinambungan pemukiman kembali. Hal ini dapat ditunjang dengan PCP berkala (yang memungkinkan penilai berkonsultasi dengan berbagai stekholder seperti: pemerintah daerah, staf pemukiman kembali di lapangan, LSM, tokoh masyarakat, dan terutama OTD). Tim pemantauan dan evaluasi biasanya juga melakukan sedikitnya satu survai pasca evaluasi untuk menilai pencapaian tujuan pemukiman kembali, perubahan terhadap taraf hidup dan mata pencarian dan pemulihan kehidupan ekonomi dan sosial OTD.

Kotak 9.1 menjelaskan persyaratan dasar KA untuk kontrak pekerjaan pemantauan dan evaluasi, yang dilakukan oleh lembaga eksternal.

| Kotak 9.1 Ringkasan KA untuk Pemantauan dan Evaluasi Eksternal |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Maksud dan tujuan P & E eksternal dalam kaitannya dengan tujuan RPK, tujuan kebijaksanaan ANB dan kebijaksanaan Bank. ● Informasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan ini, dengan mengacu pada RPK. ● Metode dan pendekatan pengumpulan informasi. ● Metodologi secara terinci, penggunaan data sensus dan survai yang tersedia, updating berkala, kerangka pengambilan sampel, komparasi dan analisis, pengendalian mutu, dan pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan. ● Partisipasi stekholder primer, khususnya OTD, dalam pemantauan dan evaluasi. ● Sumber daya yang dibutuhkan termasuk tenaga ahli dalam bidang sosiologi, antropologi sosial dan pemukiman kembali. ● Kerangka waktu P & E ● Persyaratan pelaporan |

Tabel 9.2
Indikator untuk Pemantauan dan Evaluasi Eksternal

| Indikator Pemantauan | Dasar Untuk Indikator |
|---|---|
| Informasi dasar mengenai rumah-tangga yang terkena dampak | <ul style="list-style-type: none"> ● Lokasi ● Komposisi dan struktur umur, tingkat pendidikan dan ketrampilan ● Gender (jenis kelamin) kepala rumah-tangga ● Kelompok Etnis ● Kemudahan dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, utilitas umum dan fasilitas sosial lain ● Jenis rumah ● Pola kepemilikan dan penggunaan lahan dan sumber daya lain ● Jenis mata pencaharian dan pola pekerjaan ● Sumber dan tingkat pendapatan ● Data produksi pertanian (bagi rumah tangga pedesaan) ● Partisipasi dalam kelompok RT atau dalam masyarakat. ● Kemudahan ke tempat cagar budaya dan tempat penyelenggaraan acara adat ● Nilai dari semua kekayaan yang menjadi dasar entitlement dan entitlement pemukiman kembali. |
| Pemulihan Taraf Hidup | <ul style="list-style-type: none"> ● Apakah pembayaran ganti-rugi rumah dibebaskan dari penyusutan (depresiasi), retribusi atau biaya pemindahan OTD? ● Apakah OTD telah mau menerima rumah yang dibangun? ● Apakah persepsi "masyarakat" telah dipulihkan? ● Apakah OTD berhasil mengembalikan kondisi sosial dan budaya utama? |

Tabel 9.2
Indikator untuk Pemantauan dan Evaluasi Eksternal (lanjutan)

| Indikator Pemantauan | Dasar Untuk Indikator |
|----------------------------|--|
| Pemulihan Mata Pencaharian | <ul style="list-style-type: none"> ● Apakah pembayaran ganti-rugi bebas dari penyusutan, retribusi atau biaya pemindahan OTD? ● Apakah pembayaran ganti-rugi dapat menggantikan kekayaan yang hilang? ● Apakah lahan pengganti cukup memenuhi standar? ● Apakah pembayaran pemindahan dan relokasi telah dapat menutupi biaya yang telah dikeluarkan? ● Apakah tunjangan pendapatan memungkinkan untuk mengembangkan usaha dan produksi seperti semula? |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● Apakah usaha wiraswasta yang terkena dampak telah menerima bantuan yang memadai untuk mengembangkan kembali usahanya? ● Apakah kelompok rentan diberikan kesempatan memperoleh pendapatan? Apa ini berdaya-guna dan berkesinambungan? ● Apakah pekerjaan yang disediakan dapat memulihkan pendapatan dan taraf hidup seperti sebelum adanya proyek? |
| Tingkat Kepuasan OTD | <ul style="list-style-type: none"> ● Berapa banyak OTD yang mengetahui prosedur pemukiman kembali dan ganti rugi yang merupakan haknya? Apakah OTD mengetahui bahwa ganti rugi tersebut sebagai hak mereka? ● Apakah mereka mengetahui kalau telah memperoleh haknya? ● Bagaimana OTD mengukur standar/taraf hidup dan mata pencaharian mereka telah dipulihkan? ● Berapa banyak OTD mengetahui tentang prosedur pengaduan dan prosedur penyelesaian perselisihan? |
| Efektivitas Perencanaan Pemukiman Kembali | <ul style="list-style-type: none"> ● Apakah jumlah OTD dan kekayaannya dihitung secara benar? ● Apakah ada spekulator tanah yang mendapat bantuan? ● Apakah kerangka waktu dan dana cukup memenuhi tujuannya? ● Apakah ganti ruginya terlalu banyak? ● Apakah kelompok rentan diidentifikasi dan dibantu? ● Bagaimana pelaksana pemukiman kembali menangani masalah yang tidak diduga? |
| Dampak Lain | <ul style="list-style-type: none"> ● Adakah dampak lingkungan yang tidak diinginkan? ● Adakah dampak yang tidak diinginkan terhadap pekerjaan atau pendapatan? |

Partisipasi OTD dan LSM dalam Pemantauan, Pengkajian dan Evaluasi

Keterlibatan masyarakat yang terkena dampak dan penduduk setempat dalam proses P&E dapat membantu menyelesaikan banyak masalah sehari-hari yang sering timbul dalam pelaksanaan pemukiman kembali. Kelompok yang terkena dampak, OKM lokal dan/atau LSM harus terlibat. Evaluasi yang partisipatif membantu meningkatkan kualitas pelaksanaan program dengan melibatkan stekholder primer dalam desain dan pelaksanaan evaluasi. Teknik PCP mewujudkan keterlibatan OTD dan stekholder primer lainnya dalam pemantauan dan pelaksanaan pemukiman kembali.

Tabel 9.3
Perbandingan Metode-Metode Evaluasi¹

| Pendekatan Yang Lebih Terkendali, Rasional | Pendekatan Yang Lebih Subjektif, Parsitipatif |
|---|--|
| Menguntungkan | Menguntungkan |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Cepat; mudah dihitung ● Metodologi langsung ● Mungkin terkait langsung dengan perencanaan proyek ● Terlihat lebih dapat dipertanggung jawabkan ● Lebih mudah ditangani dan tidak menimbulkan masalah yang kompleks dalam kaitannya dengan pengendalian kegiatan | <ul style="list-style-type: none"> ● Memasukkan semua pendapat dan perspektif dari semua stekholder (pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait) ● Memberi kesempatan realitas lain untuk diperhitungkan (seperti hal-hal diluar Kerangka Proyek) ● Menuju ke arah saling pengertian yang lebih serasi dan berbagi rasa (landasan kemanusiaan) |
| Merugikan | Merugikan |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Arogan dan kurang sensitif ● Hasil mungkin mencerminkan pendapat evaluator itu sendiri ● Asumsi salah tentang pengamatan yang independen dan kemampuan menangkap "realitas" ● Tidak mempedulikan realitas perubahan manusia, dan dinamika politik ● Mengasumsikan sebab dan akibat secara sederhana | <ul style="list-style-type: none"> ● Mungkin tidak sesuai dengan bentuk atau kerangka proyek ● Dapat mengganti pemeriksaan yang teliti atas pencapaian kegiatan terhadap tujuannya. ● Hanya sedikit penilai yang mengetahui cara menggunakan teknik partisipatori. ● Dapat meningkatkan harapan yang tidak akan atau tidak dapat dicapai |

1. Adapted from the Evaluation Planning Checklist in Bridging The Gap: A Guide for Monitoring and Evaluating Development Projects by Bernard Broughton and Jonathan Hampshire. Australian Council for Overseas Aid. 1997.

| Kotak 9.2 Langkah-langkah Dalam Melaksanakan Evaluasi Partisipatif |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Menentukan tingkat dan sifat partisipasi. ● Menyiapkan lingkup evaluasi pekerjaan. ● Melakukan pertemuan tim perencanaan melalui lokakarya mini. ● Melaksanakan evaluasi. ● Menganalisis data dan membuat kesepakatan mengenai hasilnya. ● Menyiapkan rencana mitigasi lanjutan, kalau disyaratkan. <p>Evaluation, 1996.</p> |

Kotak 9.3

Penilaian Cepat secara Partisipatif (PCP)

- **Wawancara dengan informan kunci:** Memilih pemimpin setempat, pekerja pedesaan atau orang-orang dengan pengetahuan atau pengalaman khusus mengenai kegiatan dan pelaksanaan pemukiman kembali.
- **Diskusi dengan kelompok sasaran:** masalah khusus (misalnya pembayaran ganti rugi lahan, fasilitas umum di lokasi pemukiman kembali, pemulihan pendapatan, masalah gender) dibicarakan dalam kelompok secara terbuka.
- **Rapat umum masyarakat:** rapat umum terbuka di tempat relokasi guna mendapat informasi tentang pelaksanaan berbagai kegiatan pemukiman kembali.
- **Pengamatan langsung terstruktur:** pengamatan lapangan atas pelaksanaan pemukiman kembali dan wawancara perseorangan atau kelompok untuk maksud pengecekan silang.
- **Survai/wawancara informal:** survei informal OTD, penduduk setempat, pekerja desa, staf pemukiman kembali, dan pegawai instansi pelaksana yang menggunakan metode non-sampel.
- **Studi kasus mendalam mengenai** OTD dan penduduk setempat dari berbagai kelompok sosial untuk menilai dampak pemukiman kembali.

Sumber: India Handbook for Resettlement dan Rehabilitation. The World Bank, 1994.

Daftar Periksa: Pemantauan dan Evaluasi

- Menentukan sistem pemantauan internal untuk menilai kemajuan dalam mencapai sasaran pokok dalam Rencana Pemukiman Kembali: anggaran dan kerangka waktu, penyerahan entitelmenn, konsultasi, pengaduan dan masalah khusus serta manfaat.
- Menyediakan waktu, sumber daya dan dana yang memadai untuk pemantauan internal.
- Melakukan pengkajian secara teratur berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi yang melibatkan stekholder primier termasuk wakil OTD. Mencapai kesepakatan atas langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemukiman kembali dan melaksanakannya.
- Menentukan sistem pemantauan dan evaluasi eksternal untuk menilai pencapaian dan kesesuaian dengan tujuan pemukiman kembali.
- Menentukan cara melaporkan pemantauan dan evaluasi serta persyaratan pelaporan.
- Melibatkan OTD, penduduk setempat (di lokasi pindahan), LSM dan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi proyek, dengan menggunakan PCP dan metode lain.
- Melakukan evaluasi pasca pelaksanaan pemukiman kembali yang dilaksanakan oleh instansi eksternal yang independen setelah proyek selesai.
- Meninjau kembali hal-hal yang dapat menjadi acuan dalam membuat keputusan dan perencanaan pemukiman kembali.

Tabel 9.4
Pemantauan dan Evaluasi dalam Siklus Proyek: Butir-butir Pokok Tindakan

| Siklus Proyek | Butir-butir Pokok Tindakan |
|--------------------------|---|
| Identifikasi Proyek/PAKS | <ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan PAKS sebagai dasar perencanaan, pemantauan dan evaluasi pemukiman kembali untuk waktu mendatang. ● Mengidentifikasi lokasi proyek. |
| Studi Kelayakan BTPP | <ul style="list-style-type: none"> ● Konsultasi dengan semua stekholder. ● Melakukan sensus dan survai untuk mendapatkan data dasar. ● Menentukan rencana P & E sebagai bagian tidak terpisahkan dari rencana pemukiman kembali, yang melibatkan sumber daya internal dan eksternal, untuk mengembangkan data dasar yang sudah ada |
| RTM | <ul style="list-style-type: none"> ● Mengkaji rencana P & E untuk koordinasi kegiatan antar instansi. ● Mengkaji anggaran dan sumber daya. |
| Penilaian | <ul style="list-style-type: none"> ● Memeriksa apakah rencana P&E akan memberi informasi mengenai kemajuan dan pencapaian tujuan pemukiman kembali. |
| Negosiasi Pinjaman | <ul style="list-style-type: none"> ● Memasukkan P&E sebagai jaminan. |
| Pelaksanaan | <ul style="list-style-type: none"> ● Mengembangkan kapasitas pemantauan tingkat lapangan. ● Melibatkan OTD/penduduk setempat dan LSM dalam pemantauan. ● Memantau secara internal kemajuan dalam mencapai target anggaran dan kerangka waktu, penyerahan entitelmen kepada OTD, konsultasi, pengaduan dan masalah khusus serta berbagai manfaat lainnya. ● Melibatkan ahli dari luar dan independen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan dan pencapaian tujuan pemukiman kembali. ● Menyiapkan laporan secara teratur mengenai semua aspek P& E. |
| Pemantauan dan evaluasi | <ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan evaluasi pasca pelaksanaan pemukiman kembali untuk menilai efektivitas, dampak, dan kesinambungan entitelmen dalam pemukiman kembali, dan untuk mempelajari strategi untuk perumusan kebijaksanaan dan perencanaan pada masa mendatang. |

Daftar Bacaan

- Achmad, Hisyam, 1991. *The Social Costs of Resettlement: A Case Study Five Years After the Inundation of the Saguling and Cirata Dam Areas in West Java*. Jakarta, Indonesia.
- Ackermann, W C., G. E White, and E. B. Worthington (eds.) 1973. *Man-Made Lakes: Their Problems and Environmental Effects*. Washington D.C.: American Geophysical Union, Monograph No. 17, 1973.
- Alexander, K., R. R. Prasad, and M. P Jahagirdar, 1991. *Tribals, Rehabilitation, and Development*, Jaipur, India: Rawat Publications, 1991.
- Alvares, Claude, and Ramesh Billorey, 1987. "Damming the Narmada: The Politics Behind the Destruction." *The Ecologist*, 17(2/3): 62-74, 1987.
- Asian Development Bank, 1991. *Guidelines for Social Analysis of Development Projects*. Manila, Philippines: Asian Development Bank, 1991.
- Asthana, Shobha, and Shri Prabhat Parashar, 1992. *Public Participation in the Resettlement & Rehabilitation Programme of Sardar Sarovar Project*. Florianopolis, Brazil: International Workshop on Involuntary Resettlement, 1992.
- Baboo, Balgovind, 1991. "Big Darns and the Tribals: The Case of the Hirakud Dam Oustees in Orissa." *Social Action*, 41 (3), 1991: 288-303.
- Barth, Fredrik and T R. Williams, 1994. *Initial Resettlement Planning and Activity (1992-1994) in a Large Scale Hydropower Process: The Ertan Dam in Southwest China*. Draft manuscript, processed.
- Bartolome, Leopoldo, 1984. "Forced Resettlement and the Survival Systems of the Urban Poor." *Ethnology* 23 (3), 1984: 177-192.
- Bilj, J., E. Janssen, M. Meijer, et al., 1992. *Slum Eviction and Relocation in Bangkok*. Delft, The Netherlands: Centre for International Cooperation and Appropriate Technology (CICAT), 1992.
- Billson, Janet Mancini, 1990. "Opportunity or Tragedy: The Impact of Canadian Resettlement Policy on Inuit Families." *American Review of Canadian Studies*, 20 (2), 1990: 187-218.
- Boonyabancha, Somsook, 1992. "Urban Relocation in Bangkok; with a Case Study on Ruamjai Samakki Resettlement Project." *Urban Relocation Policy and Practice*, 1992.
- Borup, J. H., D. T Callego, and P G. Heffernan, 1979. "Relocation and Its Effects on Mortality. " *The Gerontologist*, 19, 1979: 135-140.
- Burbridge, Peter R., Richard B. Norgaard, and Gary S. Hartshorn, 1988. *Environmental Guidelines for Resettlement Projects in the Humid Tropics*. Rome, Italy: Food and Agri-culture Organization of the United Nations. FAO Environment and Energy Paper 9.1988.
- Centre for Urban Studies, 1987. *Socio-Economic Profile of Dattapara: A Squatter Resettlement Camp, Tongi Dhaka, Bangladesh*: University of Dhaka, 1987.
- Cernea, Michael M., 1995. *The Sociological Action Research of Development-Induced Population Resettlement*. World Bank Reprint Series: Number 480, Washington. D.C.: 1995.
- Cernea, Michael M., 1995. *Understanding and Preventing Impoverishment from Displacement. Reflections on the State of Knowledge*. World Bank Reprint Series: Number 478, Washington D.C.:1995

Cernea, Michael M., 1993. "Social Science Research and the Crafting of Policy on Population Resettlement," *Knowledge and Policy* vo1.6, no. 3-4.

Cernea, Michael M., and S. E. Guggenheim (eds.), 1993. *'Anthropological Approaches to Involuntary Resettlement, Policy Practice, and Theory'* Boulder, CO: Westview Press, 1993.

Cernea, Michael M., 1991. "Socio-Economic and Cultural Approaches to Involuntary Population Resettlement." *Guidelines on Lake Management*, 2, 1991: 177-188. World Bank Reprint Series: No. 468, Washington, D.C.: 1993.

Cernea, Michael M., 1991. "Involuntary Resettlement: Social Research, Policy, and Planning. In *Putting People First. Sociological Variables in Rural Development*, 2nd edition, revised and enlarged. Edited by M. M. Cernea, pp 188-216. New York/Oxford: Oxford University Press.

Cernea, Michael M., 1990. *Poverty Risks from Population Displacement in Water Resources Development*, Harvard University, HIID, Development Discussion Paper No. 355. Cambridge, MA, August.

Cernea, Michael M., 1990. *From Unused Social Knowledge to Policy Creation: The Case of Population Resettlement* Harvard University, Cambridge, MA, HLID, 1990.

Cernea, Michael M., 1990. "Involuntary Resettlement and Development." *Finance and Development*. 25.3, 1988: 44-46. Also published in Hari Mohan Mathur (ed.), *The Human Dimension of Development: Perspectives from Anthropology* New Delhi: Concept Publishing Company, 1990.

Cernea, Michael M., 1990. "Internal Refugee Flows and Development-Induced Population Displacement." *Journal of Refugee Studies*, 3 (4), 1990: 320-339. World Bank Reprint Series: No. 462, Washington, D.C. 1990.

Cernea, Michael M., 1990. *Poverty Risks from Population Displacement in Water Resources Development*. Harvard University, Cambridge, MA, HIID, 1990.

Cernea, Michael M., 1988. *Involuntary Resettlement in Development Projects. Policy Guidelines in World Bank-Financed Projects*. World Bank Technical Paper no. 80. 1988.

Chandran, T R. Satish, and Aloysius Fernandes, 1990. *Workshop on Rehabilitation of Persons Displaced by Development Projects*. Bangalore, India: Institute for Social and Economic Change, 1990.

Degroot, David G., 1979. *Initiating Urban Development: Slum Improvement and Resettlement in Davao City* Dissertation. Boulder, CO: University of Colorado, 1979.

Dhagamwar, Vasuda, 1989. "Rehabilitation: Policy and Institutional Changes Required. In Waiter Fernandes and Ganguly Thukral (eds.), *Development, Displacement and Rehabilitation: Issues for a National Debate*. New Delhi, India: Indian Social Institute, 1989.

Drucker, Charles, 1984. "Dam the Chico: Hydro Development and Tribal Resistance in the Philippines." *The Social and Environmental Effects of large Dams*. E. Goldsmith, and N. Hildyard (eds.). Camelford, UK: Wadebridge Ecological Center, 1984.

Egre, Dominique, and Pierre Senecal, 1990. "Resettlement Studies and Human Environment Impact Assessment of Water Control Projects: Similarities and Discrepancies." *Impact Assessment Bulletin*, 8 (3), 1990: 5-18.

Escudero, Carlos R. *Involuntary Resettlement in Bank-Assisted Projects: An Introduction to Legal Issues*. Legal Department. Washington, D.C.: The World Bank, 1988.

- Farvacque, Catherine, and Patrick McAuslan, 1992: *Reforming Urban Land Policies and Institutions in Developing Countries*. Urban Management Program Policy Paper. Washington, D.C.: The World Bank, 1992.
- Fernandes, Waiter, 1992. *Displacement as a Process of Marginalization*. Florianopolis. Brazil: Electrobas, 1992.
- Fernandes, Waiter, 1991. "Power and Powerlessness: Development Projects and Displacement of Tribals." *Social Action*, 41 (3), 1991: 243-270.
- Fernandes, Waiter and E. G. Thukral, 1989. *Development, Displacement, and Rehabilitation: Issues for a National Debate*. New Delhi, India: Indian Social Institute, 1989.
- Fiang, Tian, and Lin Fatang. "Population Resettlement and Economic Development in the Three Gorges Project." *Chinese Geography and the Environment*, 1 (4), 1988: 90-100.
- Finsterbusch, Kurt, 1980. *Understanding Social Impacts. Assessing the Effects of Public Projects*. Beverly Hills-London: Sage Publications.
- Goldsmith, Edward, Nicholas Hildyard, and Denys Trussell (eds.), 1986. "The Social and Environmental Effects of Large Dams. Case Studies." *Camelford, U.K.: Wadebridge Ecological Centre*, 2, 1986.
- Guggenheim, Scott, 1994. *Involuntary Resettlement: An Annotated Reference Bibliography for Development Research*. Environment Working Paper No. 64. The World Bank, Environment Department.
- King, Victor T, 1986. *Planning for Agrarian Change: Hydro-electric Power, Resettlement and Iban Swidden Cultivators in Sarawak, East Malaysia*. Hull: Centre for Southeast Asian Studies, University of Hull, 1986.
- Koenig, Dolores, 1992. *Women and Resettlement*. Washington, D.C.: American University, Department of Anthropology, 1992.
- Kool, M., D. Verboom, and J. J. van der Linden, 1989. "Squatter Settlement Improvement and Displacement: A Review of Concepts, Theory, and Comparative Evidence." *Habitat International* 13 (3), 1989: 187-199.
- Morse, Bradford, and Thomas Berger, 1992. *Sardar Sarovar: A Report of the Independent Review*. Ottawa, Canada: Resource Futures International (RFI) Inc., 1992.
- Murphy, Denis, 1990. *A Decent Place to Live -- Urban Poor in Asia*. Bangkok, Thailand: Asian Coalition for Housing Rights, 1990.
- ODA, 1995. *A Guide to Social Analysis For Projects in Developing Countries*. London: HMSO.
- OECD, Development Assistance Committee, 1992. *Guidelines for Aid Agencies on Involuntary Displacement and Resettlement in Development Projects*. OECD: Paris.
- Oliver-Smith, Anthony, 1991. "Involuntary Resettlement, Resistance and Political Empowerment". *Journal of Refugee Studies*, 4 (2), 1991: 132-149.
- Palmer, G, 1974. "The Ecology of Resettlement Schemes." *Human Organization*, 33 (3), 1974: 239-250.
- Partridge, William, 1989. "Involuntary Resettlement in Development Projects." *Journal of Refugee Studies*, 2 (3), 1989: 373-384.
- Pokharel, Jagadish C, 1993. "Unresolved Conflicts and Missed Justice: Prospects and Limitations of Mediated Conflict Resolutions in Involuntary Displacement in Developing Countries."

- Development Induced Displacement: Approaches to Resettlement in Asia*. Hari Mohan Mathur (ed.). (In Press), 1993.
- Ranade, V M, 1992. *Reservoirs and Environment*. India: Government of Maharashtra, 1992.
- Rao, Kishore, and Charles Geisler, 1989. "The Social Consequences of Protected Areas Development for Resident Populations." *Journal of Natural Resources*, 2, 1989.
- Scudder, Thayer, 1993. "Monitoring a Large-Scale Resettlement Program with Repeated Household Interviews." In K. Kumar liapid Appraisal Methods, Washington, D.C., 1993.
- Scudder, Thayer, 1991 a. "Sociological Framework for the Analysis of New Land Settlement," in Cernea, M. (ed.) *Putting People First. Sociological Irriables in Development*, New York Oxford, 2nd ed., Oxford University Press.
- Shi, Guoqing, 19963. "The Comprehensive Evaluation Method and its Application of Production and Living Standard for Rural Resettlers in Reservoir Area." In NRCR, *Papers on Resettlement and Development*, Nanjing.
- Shi, Guoqing, Xun Houping, and Yu Wenxue, 1996. "Advances in Project Resettlement Research." In NRCR, *Papers on Resettlement and Development*, Nanjing.
- Sim, Hew Cheng, 1991. "Agrarian Change and Gender Relations: The Case of Batang Ai Resettlement Scheme, Sarawak, A Brief Summary." *Borneo Research Bulletin*, 23, 1991: 99-102.
- Singh, Mridula and assoc., 1992. *Displacement by Sardar Sarovar and Theri: A Comparative Study of Tivo Darns*, Delhi, MARG.
- Soemarwoto, Otto, and Edy Brotoisworo, 1990. *Proposed Recommendations Towards Improving Water Resources Management in River/Lake Basin Context: The Saguling Case, Indonesia*. Indonesia: Institute of Ecology -- Padjadjaran University, 1990.
- World Bank, 1996. *Operational Directive No. 4.30 Involuntary Resettlement: Guidelines for Lawyers*.
- World Bank, 1994. *Regional Remedial Action Planning for Involuntary Resettlement in World Bank Supported Projects*. A Report on One Year of Follow-Up to Resettlement and Development, The Report of the Bankwide Resettlement Review, November. Report No: 15292 GLB.
- World Bank, 1994. Resettlement and Development. *The Bankwide Review of Projects Involving Involuntary Resettlement 1986-2003*. Environment Department, April.
- World Bank, 1993. *Gender and Resettlement: An Overview of Impact and Planning Issues in World Bank Assisted Projects*. Paper prepared for the Bankwide Resettlement Review.
- World Bank, 1990. Operational Directive No. 4.30. *Involuntary Resettlement*. World Bank, 1986. Operational Manual Statement No. 10.08. *Operations Policy Issues in the Treatment of Involuntary Resettlement*.
- Zaman, M. Q, 1996. Development and Displacement: Toward a Resettlement Policy for Bangladesh. *Asian Survey*, Vol. 36(7).
- Zaman, M. Q, 1991. The Displaced Poor and Resettlement Policies in Bangladesh. *Disasters*, Vol. 15(2).
- Zaman, M. Q, 1990. Land Acquisition and Compensation in Involuntary Resettlement. *Cultural Survival Quarterly*, Vol. 13(4).

Zaman, M. Q, 1990. Paper delivered at the 49th Annual Meeting of the Society for Applied Anthropology (York, Ontario). *The Displaced Poor and Resettlement Policies in Bangladesh*. Alberta, Canada, 1990.
